

Intoleransi dan Sektarianisme Keagamaan: Sebuah Survey Literatur

Zuly Qodir

Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Peneliti Senior Maarif Institute dan Tenaga Ahli Lembaga Pemantapan Pancasila Unit Kerja Presiden

Abstrak: *The study in this paper provides an explanation about the issue of sectarian-ism and religious intolerance occurring in Indonesia especially and some other countries. There are several factors that influence such as mental health factors, economic and political factors other than religious commitments that encourage a person to perform jihad actions that are interpreted as "war" by violence. There is a lot of field data explaining the occurrence of violent and intolerant practices in Indonesia. The study in this paper is based on literature review either in the form of books, research or survey conducted by several independent institutions in Indonesia.*

Kata Kunci: *intoleransi; sektarianisme; jihad; kekerasan*

Pendahuluan

Indonesia, merupakan Negara yang secara agama multi religious, baik internal (Islam terdapat berbagai mazhab), sedangkan secara eksternal kita mengenal enam "agama resmi" Negara, yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara agama-agama non resmi seperti agama-agama suku dan keyakinan-keyakinan lokal seperti Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Cirebon, Parmalin di Sumatra, Wetu Telu di Lombok tidak diakui sebagai agama. Bersama-sama dengan Penganut Pengasih, Sapto Dharmo, dan lainnya di Jawa dikenal dengan sebutan penganut penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa dan bagian dari kebudayaan. Padahal betapa banyaknya yang tidak masuk dalam ranah "agama resmi" Negara jika berdasarkan UU PNPS tahun 1965 yang hanya mengakui enam agama resmi saja: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu, di luar enam tidak termasuk agama atau aliran yang sah di Indonesia.

Kita dapat memperhatikan perkembangan perilaku intoleransi di Indonesia yang sejak lima tahun terakhir terus meningkat. Ketika kita memasuki tahun baru 2013 disinyalir penuh rapor merah dalam hal kehidupan beragama.

Sejumlah survey memberikan rapor merah atas kebebasan beragama khususnya terkait kaum minoritas seperti Jemaah Ahmadiyah, Jemaah Syiah Indonesia, minoritas Kristen di daerah tertentu, sampai minoritas penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa.

Bahkan jika kita perhatikan sejak tahun 2005, ketika MUI mengeluarkan Fatwa Haram dan Sesat atas beberapa paham keagamaan di Indonesia seperti terhadap Ahmadiyah (Qodian), Salamullah, Isa Bugis, LDII, JIL, dan Islam Shalat Dua Bahasa ala Yusma Roy, maka semakin banyaklah paham-paham di dalam Islam yang menjadi varian Islam Indonesia. Bahkan, yang paling sensasional adalah belakangan sejak tahun 2013 akhir Syiah di Indonesia, terutama sejak Peristiwa Sampang, Syiah dituduh pula sesat dan sebagian umat islam ramai-ramai menghukum Syiah. Padahal kita ketahui terlalu banyak cendekiawan muslim dan ulama Syiah yang memberikan inspirasi atas perkembangan dan pencerahan Islam di Indonesia. Sebut saja Alamah At Thabathai, Imam Khomaeni, Alamah Murthada Mutahari, Syayed Hosein

Nashr, Ali Syariati dan banyak lagi. Apa pasal kok Syiah sekarang ramai-ramai disesatkan di Indonesia? Tentu saja mengundang pertanyaan yang serius untuk penganut Islam di Indonesia.²

Dalam kaitannya dengan kehidupan demokrasi di Indonesia, saat ini masyarakat yang tengah menunggu Pilkada Serentak sering mendapatkan berbagai bentuk kampanye hitam, yang dilakukan lawan-lawan politik seperti isu SARA yang dimunculkan, isu rasial, isu sang pecundang dan seterusnya. Hal apakah yang sebenarnya sedang terjadi dengan bangsa ini dalam berdemokrasi? Kejahatan politik yang muncul harus direspon seperti apa yang seharusnya oleh masyarakat, seperti apa yang dilakukan oleh aparaturnegara juga yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu atas berbagai macam kejahatan politik?

Di sinilah kajian tentang Intoleransi sekaligus Sektarianisme Agama menjadi sangat perlu dilakukan sehingga memberikan kontribusi akademik bukan saja pada para akademisi, peneliti tetapi sekaligus pemerintah dan pihak para pengambil kebijakan tentang agama dan kehidupan keagamaan di Indonesia. Dengan kajian yang mendalam kita hendak memberikan pencerahan dan mengurai benang kusut intoleransi agama agama dan kejahatan umat agama dan perilaku keagamaan yang sudah di depan hidung kita. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh dua lembaga diatas kita dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga untuk tahun 2016 mendatang, jika Negara ini benar benar hendak melakukan perubahan secara fundamental dalam hal kebebasan kehidupan beragama.

Tema kebebasan beragama yang hubungannya dengan intoleransi dan sektarianisme sebenarnya bukan tema baru, namun tetap selalu relevan untuk konteks masyarakat pluralistik (majemuk) semacam Indonesia, sebab hal ini akan berhubungan dengan pelbagai macam keyakinan keagamaan (baik internal agama/satu agama maupun antar agama). Sektarianisme agama sendiri dalam ensiklopedia Nurcholish Madjid disebutkan sebagai sikap atau pun perilaku yang menganggap dirinya sendiri dan golongannya yang benar dalam lingkungan agama yang sama, intoleran atas pandangan/paham yang berbeda dengan kelompoknya/dirinya sendiri sehingga pihak lain dianggap “kafir”, sesat serta tidak bisa dibenarkan. Indikasi dari sektarianisme adalah keenganan atau ketidaksediaan seseorang atau kelompok untuk bergaul dalam bidang keagamaan dengan orang atau kelompok lain dalam lingkungan umat yang sama. Misalnya jika mereka merupakan golongan atau kelompok atau orang yang lahir dari golongan Islam, maka enggan atau tidak bersedia sholat bersama dengan kelompok lainnya. Sikap sektarianisme ini gampang tergelincir atau menggelincirkan seseorang atau kelompok pada adanya kultusisme (cult); sebuah sikap penyembahan atau ketundukan yang berlebihan pada seseorang atau pimpinan sehingga memutlakan sang pemimpin, tafsir tunggal, kebenaran tunggal pemimpin, janji keselamatan, apokaliptik, tanpa sikap kritis dan sejenisnya termasuk janji “surga dan bahkan kenik- matan seksual” atas jamaah.

Sikap sektarianisme dan intoleransi di Indonesia sering terjadi dalam agama selalu akan bertentangan dengan sikap persaudaraan internal dan antar umat beragama. Jika dengan umat berbeda akan muncul pula pandangan eksklusiv dan intoleran, demikian pula dengan umat yang sama. Dari sana kemudian memunculkan paham radikalisme bahkan terorisme yang sangat mengerikan, sebab dengan dalih “menyelamatkan agama” dan “menyelamatkan umat” tidak segan melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan atas nama keyakinan/akidah yang dipahami. Sektarianisme telah muncul sejak dahulu ketika disinyalir akan terjadi perpecahan umat menjadi 73 kelompok namun hanya satu yang “lurus” sesuai ajaran ahlu Sunnah wal jamaah. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk agama Islam tentu Indonesia akan banyak dipengaruhi oleh umat terbanyak ini. Tetapi kita tidak bisa menjadi negara dengan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas karena akan menumbuhkan perilaku keagamaan yang

tidak “tulus”, tetapi penuh dengan prasangka prasangka negative yang tidak produktif untuk pertumbuhan demokrasi.

Intoleransi Keagamaan

Data tentang intoleransi keagamaan, sampai tahun 2016, 2 Agustus 2016, Survei Wahid Foundation menemukan sejumlah data yang dinilai cukup mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden, sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan lainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.⁴

Dari sisi radikalisme sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia menolak untuk berbuat radikal seperti melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain atau melakukan sweeping tempat yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Hanya 7,7 persen yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal.

Terdapat beberapa factor yang memungkinkan munculnya radikalisme di kalangan kaum muda dalam beragama; factor tersebut adalah: pertama, soal mental health. Michael McCullough and Timothy Smith (2003), dalam *Religion and Health: Depressive Symptoms and Mortality as Case Studies*, melaporkan bahwa kesehatan mental yang ada pada diri kaum muda sebagai posisi yang sangat rentan, sehingga kaum muda gampang mengalami goncangan jiwa (depression) yang disebabkan oleh berbagai factor dalam hidup. Depression (goncangan jiwa) muncul karena kekegagalan akan datangnya kegagalan dalam hidup, kebahagiaan yang tidak dapat diraih, perkawinan atau berpasangan dengan pasangannya yang tidak membahagiakan dan hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga mendukung munculnya krisis dan stress, kebosanan yang mendalam serta berbagai simptom untuk depresi. Kaum muda berada pada posisi yang rentan, seperti dilaporkan ahli sosiologi kaum muda asal Pennsylvania tersebut.⁵

Mental health kesehatan mental karena itu akan berhubungan erat dengan soal kondisi jiwa seperti kebahagiaan dan kebosanan. Kondisi sosial ekonomi yang mendorong jiwa menjadi depresi misalnya keterjeratan ekonomi, teman yang suka menipu, perilaku yang menyimpang dari ungkapan atau pembicaraan, semuanya akan dengan mudah mendorong seseorang mengalami depresi. Depresi keagamaan akan muncul secara intrinsic (dari dalam diri) sebagai religious involment yang kemudian berkembang menjadi public involment dalam keagamaan. Semakin kuat dorongan depresi maka akan semakin kuat dorongannya pada public religious involment baik kalangan kaum muda laki-laki maupun perempuan.⁶

Hubungannya antara mental health dengan perspektif sosiologis berada pada titik ketika kondisi sosial yang berada didepannya mendorong munculnya kebosanan, ketidakadilan sistemik dan jurang gap and leak) pada soal ekonomi maupun politik maka orang akan gampang sakit hati kemudian melakukan perlawanan. Ted Robert Gurr, dalam *Why Men Rebel*, 1967, melaporkan bahwa kondisi deprivasi semacam itu akan menjadi bibit munculnya perlawanan bahkan pemberontakan, seperti dinyatakan dalam teori deprivasi relative (relative deprivassion) sebagai kondisi yang dialami sebagian kelompok masyarakat dalam memperoleh kesempatan ekonomi maupun politik. ⁷

Kedua, factor ekonomi yang timpang. Kesenjangan ekonomi yang selama ini terjadi akan

dengan mudah menciptakan kemarahan sosial . Dalam bahasa kaum sosiolog kesenjangan ekonomi akan menciptakan social greavences (kegalauan dan kecemburuan sosial) atas masyarakat yang mendapatkan kelimpahan ekonomi, apalagi jika kelimpahan ekonomi didapatkan dengan cara-cara yang tidak transparan, dengan cara korupsi, memalak uang Negara, melakukan penyuapan dan melakukan penggelapan pajak misalnya. Maka social greavences akan dengan gampang muncul dan kemudian terorganisasi dalam masyarakat. Dinamika ekonomi masyarakat akan mendorong pada komitmen keagamaan seseorang sehingga seseorang dan kelompok yang mengalami penderitaan ekonomi akan memungkinkan muncul dua sikap beragama sekaligus. Jika ekonomi baik akan sangat mungkin tidak memiliki perasaan cemburu pada mereka yang sama-sama baik secara ekonomi dan rajin mendatangi kegiatan keagamaan, seperti pengajian, memberikan sedekah dan juga rajin mengerejakan ritual seperti datang ke masjid (untuk orang Islam, naik haji) dan rajin ke gereja untuk orang Kristen. Tetapi jika ekonominya menyusahakan maka akan memungkinkan untuk menaruh rasa cemburu pada sesama penganut agama bahkan penganut agama yang berbeda. Enggan menjalankan aktivitas keagamaan seperti pengajian, beribadah ritual seperti shalat atau ke gereja dan jarang berkumpul dengan yang memiliki ekonomi mapan. Cemburu sosial ekonomi mendorong seseorang dan kelompok untuk melakukan protes sosial terhadap kondisi yang dihadapi di depan kehidupannya. Protes dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya tidak mendatangi perkumpulan, enggan bergaul, sampai dengan mengorganisasikan diri bersama yang lain untuk melakukan perlawanan karena system yang dinilai tidak adil.⁸

Kajian lain yang menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi akan mendorong rajin berderma dilakukan oleh Richard Wood, dalam *Religion and the Struggle for Justice*, 2003. Wood melaporkan bahwa kondisi ekonomi yang baik akan mendorong rajin beribadah dan menyumbang perkumpulan. Dalam kasus ini Wood melihat kalangan kaum Kristiani di Amerika yang memiliki ekonomi bagus sangat rajin ke gereja mencapai 38 % dari jamaah gereja tersebut adalah kulit putih yang sejahtera, sementara kulit hitam yang sengsara hanya mencapai 9 %, bahkan dari kalangan gereja Asia hanya mencapai 2 % yang suka berderma. Mereka itu secara denominasi (aliran keagamaan) adalah Katolik Roma (Roman Katolik 35 %), Protestan Liberal/Moderat mencapai 34 %), sementara yang beraliran Pantekosta yang selama ini tampak dikenal dermawan ternyata hanya mencapai 2 % dalam berderma untuk masyarakat.⁹

Penjelasan sosiologisnya tentang keterbelakangan ekonomi adalah akan memunculkan protes kelas sosial antara kaum kere dengan kaum kaya raya atau borjuis. Tradisi semacam ini telah lama dikenal dalam kajian sosiologi ketika Karl Mark mengintrodusir adanya perang kelas sosial dalam masyarakat industri yang menguasai sumber-sumber ekonomi, sementara kelas kere (rakyat jelata) hanya menjadi buruh pabrik yang dieksploitasi tenaganya sementara pendapatannya tidak mendukung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu perang kelas sosial sebenarnya menjadi bagian dari perang religious economics yang selama ini kita kenal dalam tradisi ekonomi kapitalistik yang diduga keras menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Jika ketidakadilan ekonomi ini terus berlangsung dan menimpa sebagian masyarakat kecil, dan mereka mentransformasikan pada generasi muda maka dengan mudah akan menggerakkan untuk melakukan perlawanan atas ketidakadilan ekonomi yang sistematis.

Argumen ekonomi yang timpang dapat mendorong perilaku agresif juga dilaporkan oleh Jose Casanova, dalam *Public Religious in Amerika*, 1994, yang menjadi embrio dari public religious atau dikenal dengan sebutan agama sipil Amerika. Kondisi ekonomi yang timpang merupakan turunan dari kebijakan ekonomi politik sebuah Negara yang secara tidak

langsung menimpa masyarakat beragama. Oleh sebab itu, masyarakat beragama (masyarakat sipil) kemudian mengalami privatisasi dalam beragama yang kemudian hari akan menumbuhkan kebencian pada kelompok lain yang lebih sejahtera. Kebencian tersebut lama kelamaan menimbulkan antipasti dan perilaku destruktif sebagai rangkaian dari isu keagamaan yang dimulai dari persoalan ekonomi politik publik. Masyarakat kemudian melakukan protes secara reorganisasi untuk menuntut adanya kondisi yang adil bukan timpang, namun jalan pintasnya adalah melawan Negara dengan cara kekerasan sebab tidak mengusai public opini sebagai arena bernegosiasi dan melampangkan kehendaknya.¹⁰

Ketiga, kondisi sosial politik yang berpengaruh pada adanya perubahan perilaku dan bentuk organisasi keagamaan. Peter Beyer, sosiolog kenamaan abad ini memberikan penjelasan bahwa sekarang dan mendatang karena perubahan kebijakan politik dunia, sebagai bagian dari politik globalisasi akan menyembulkan perubahan-perubahan dalam pola (bentuk) dari sikap keagamaan dan pengorganisasian keagamaan. Peter Beyer dalam *Social Form of Religion in Contemporary Society*, 2003, melaporkan bahwa ke depan akan terjadi persemaian (*proliferation of religious organization in society*) yang berhubungan keyakinan dan perilaku keagamaan masyarakat karena politik dunia berubah drastic. Perubahan-perubahan masyarakat akan berpengaruh pada sikap dan pandangan keagamaan seseorang dan kelompok dalam mencikap globalisasi yang kadang tidak menguntungkan kelompok yang lebih besar, tetapi menguntungkan kelompok kecil sebagai pemilik modal besar dan pembuat kebijakan global. ¹¹

Struktur politik yang berubah akibat politik globalisasi, akan berdampak semakin luas pada bentuk-bentuk keagamaan pada era kontemporer. Globalisasi politik akan menciptakan perbedaan yang keras dalam masyarakat, siapa yang mendapatkan keuntungan dari politik globalisasi dan tidak mendapatkan keuntungan yang memadai, sehingga menimbulkan perlawanan yang diorganisasikan dengan baik kepada sesama jamaah, mengorganisasikan aksi-aksi secara sistematis dan para simpatisan yang memiliki pikiran dan cara pandang yang sejenis sebagai sebuah aktivitas perlawanan. ¹²

Setelah secara kelompok terorganisir dengan baik dan jamaah yang dianggap memenuhi syarat (jumlahnya cukup banyak), maka akan melakukan apa yang dinamakan *social movement religion* sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan yang independen. Gerakan-gerakan keagamaan yang dilakukan sebenarnya bukan hanya untuk kaum muda, tetapi juga kaum tua dan kaum perempuan. Seperti dilaporkan Peter Beyer, bahwa gerakan keagamaan yang independent tersebut bergerak dalam banyak level seperti kaum perempuan, aktivis lingkungan, aktivis perdamaian bahkan aktivis ekonomi yang secara bersama-sama melakukan gerakannya karena dorongan *religious commitment* dan *religious movement* sebagai keyakinan untuk perubahan system sosial politik yang menjerat. Gerakan-gerakan yang dilakukan berjalan dari hal yang kecil seperti pemasangan spanduk, membuat perkumpulan sampai membuat aksi massa yang berjumlah besar dan yang paling keras adalah membuat boikot produksi.¹³

Dalam perspektif sosiologis, persoalan keagamaan akan dihubungkan antara struktur politik yang dihadapi oleh masyarakat dengan perubahan-perubahan yang akan muncul di dalamnya seperti dalam hal hubungan sosial yang kadangkala timpang, mengalami segregasi, menumbuhkan kultur baru dalam hal tradisi seperti semangat individualis yang menguat tetapi sekaligus paradox dengan semangat berkelompok untuk melawan yang juga kuat. Globalisasi politik kemudian menumbuhkan apa yang dinamakan situasi baru dalam masyarakat, menumbuhkan berbagai variasi masyarakat yang kadang menjadi friksi (*distinction*) yang

bersifat contested antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Disinilah globalisasi politik kemudian secara nyata menumbuhkan religio-political movement, termasuk dilakukannya kaum muda yang masih labil secara ekonomi dan emosi.

Keempat, religious commitment dari pemahaman keagamaan. Ditengah banyaknya persoalan serius yang menimpa bangsa ini, soal kepastian-kepastian orang dan kelompok dalam hidup menjadi tuntutan yang nyaris selalu hadir. Agama tidak bisa dilihat dalam perspektif antara profane dan sacral. Seluruh dimensi keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang sacral. Tidak ada yang profane dalam agama, karena itu dukungan pemahaman atas yang sacral selalu mendapatkan pengikut yang cukup pesat ditengah masyarakat yang galau (grevences). Terdapat banyak alasan mengapa orang menghendaki kepastian-kepastian dalam hidup. Jihad dianggap salah satu jalan meraih kepastian hidup di surga, selain di muka bumi.

Jihad, demikian kata yang paling populer dalam khazanah perlawanan fisik yang dilakukan sekelompok penganut agama tidak pernah berhenti dikumandangkan. Jihad harus mencakup segala bidang, tanpa kecuali dalam bidang politik, ekonomi dan kultural. Bahkan pembangunan politik dan kultur ekonomi masyarakat harus dihadapi dengan jihad dalam maknanya perlawanan dengan cara-cara kekerasan. Perhatikan ungkapan Jamal Al-Bana ketika memberikan tafsir soal makna jihad,:

“Sekarang ini jihad sudah sedemikian harus dilakukan... oleh sebab itu, jihad harus mencakup perjuangan pembangunan, peradaban, kerakyatan dan keislaman. Tidak ada lagi pemilahan mana yang sakral dan profane sebab nyaris tidak bisa dibedakan secara mudah. Lawan-lawan Tuhan telah bergerak demikian hebat yang juga harus dilawan dengan hebat dan sistematis”.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, kita menjadi mengetahui kenapa terdapat kelompok orang yang rela mati demi sebuah kelompok, rela mati menjadi martir atas kelompok yang marginal, sekelompok orang rela mati dalam pasungan dan gas beracun atau pun bom Molotov demi sebuah keyakinan yang dipercaya sebagai religious commitment. Tuhan tidak bisa dipermainkan dan tidak bisa diprofankan! Inilah ungkapan yang paling mewakili kaum jihadis yang tidak pernah segan melakukan aksi kekerasan dan terror atas kondisi yang berlangsung disekitarnya. Sayangnya, hampir setiap pemeluk agama memiliki pemahaman yang berbeda dan beragam dalam memahami makna jihad. Tidak ada kata yang tunggal tentang jihad tersebut sehingga menjadi berbagai macam kelompok. Satu kelompok dapat mendistorsi kelompok lainnya karena persoalan pemahaman yang dikembangkan.

Hal paling mengerikan sebenarnya adanya pemahaman yang mengharuskan kesamaan dalam hal jihad. Jihad adalah kekerasan dan perlawanan dengan senjata, dengan kekuatan fisik bukan sebagai perlawanan atas nafsu yang menghipnotis seseorang sehingga lupa ingatan atau lupa akan tugas kemanusiaan. Disinilah kaum muda seringkali menjadi sasaran kaum jihadis yang memaknai jihad adalah perlawanan dengan kekerasan dan perang fisik. Kaum muda dapat tergiur karena alasan religious commitment yang dikonstruksikan adalah sebagai pembela keadilan Tuhan di muka bumi, dan yang membelanya adalah pahlawan agama yang akan mendapatkan tempat mulia disisi Tuhan.

Kekerasan atas Nama Agama

Terjadinya kekerasan antara agama di Indonesia, dan di tempat lain tidak pernah berhenti pada analisis dan tindakan untuk mencegahnya lebih luas. Tetapi sebelum jauh membahas soalkekerasan atas nama agama, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan memandu dalam tulisan ini nantinya sehingga posisi tulisan ini jelas adanya. Beberapa pertanyaan penting

yang saya ajukan di sini adalah:

Uraian bagian ini akan Saya memulai dengan beberapa pertanyaan, seperti beberapa tertera disini: Mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror- kekerasan atas nama agama atau sebagai teroris? Apa alasan-alasan yang menjustifikasi aksi terorisme di Indonesia? Siapakah mereka para pelaku teror di muka bumi itu? Ternyata jawabannya dapat perorangan, kelompok maupun organisasi bahkan lembaga (individual atau negara). Dimanakah mereka melakukan aksi teror? Yang saya sebutkan sebagai target sasaran teroris. Pekerjaan teroris dikerjakan di area mana, mengapa daerah tersebut yang menjadi sasaran, dengan alasan apa? Dan pertanyaan penting lainnya, sampai kapankah aksi-aksi terorisme akan berlangsung dalam sebuah negara? Dalam bahasa lain dapat dirumuskan untuk kepentingan apakah aksi-aksi teror dilakukan oleh individu, kelompok, dan negara?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, ada beberapa asumsi yang dapat menjelaskan mengapa semua itu terjadi. Tentu saja dapat dikembangkan lebih banyak lagi dan sesuai dengan perspektif yang hendak disampaikan oleh para pengamat dan peneliti atau pun intelektual. Dalam konteks ini, para ahli memberikan penjelasan terdapat beberapa asumsi yang memungkinkan terjadinya kekerasan atas nama agama. Beberapa asumsi tersebut antara lain adalah sebagaimana di bawah ini:

Dengan perspektif sosial politik, ekonomi, dan psikologi dalam melihat adanya kekerasan atas nama agama atau bahkan terorisme di Indonesia ternyata hal tersebut dari segi actor atau kelompok pelaku adalah ada beberapa kelompok agama (Islam, Kristen, Hindu, Yahudi) melakukan aksi- aksi kekerasan terhadap pihak lain dan sekaligus sebagian membenarkan perilaku kekerasan tersebut. Para actor pelaku kekerasan datang dari pelbagai kelompok yang memiliki alasan masing-masing dari alasan teologis sampai alasan sosial bahkan mungkin juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argument yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan.

Terdapat banyak yang menyebabkan kekerasan antara agama di Indonesia. Secara sederhana dapat dikatakan disini ada faktor-faktor yang menjadi penyebab atas terjadinya terorisme di sebuah negara dilakukan oleh seke- lompok orang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Bisa benar atau pun bisa salah tetapi dasar legitimasi seperti itu sering muncul dipermukaan ketika seseorang mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam namun ujungnya satu saja yakni kekerasan atas nama agama.

Siapakah pelaku terorisme. Setelah diselidiki ternyata para perilaku terorisme karena ada sesuatu yang “dibela” di belakangnya, apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat adalah adanya perbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang lain. Mereka para teroris menggunakan istilah “political representative” sehingga membenarkan apa yang dilakukan bahwa pihak lain tidak merasa diwakili merupakan persoalan lain yang jauh dipikirkan oleh para pelaku kekerasan atas nama agama dan atas nama masyarakat.

Alasan dasar keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama yang membenarkan perilaku teroris dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam proses kekerasan agama yang terjadi di muka bumi. Pendasaran atas teks suci keagamaan merupakan pendasaran yang cukup meyakinkan yang dilakukan oleh para pelaku terorisme keagamaan. Benar bahwa terdapat multi tafsir atas teks keagamaan namun yang dipergunakan

oleh para pelaku terorisisme dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan atas orang lain sebagai bentuk membela agama bahkan membela Tuhan atas nama teks suci.

Mendasarkan pada beberapa asumsi diatas maka kita menjadi jelas bahwa dalam perbuatan kekerasan atas nama agama terdapat beberapa penyebab yang mendasarinya. Sangat banyak kelompok menafsirkan penyebab terja- dinya kekerasan atas nama agama dan sebagian lagi membenarkan kekerasan atas nama agama yang sampai saat ini terus berlangsung di Indonesia dan di Negara-negara lain. Persoalannya menjadi semakin keras dan rmit ketika tidak mendapatkan titik temu untuk melakukan eliminasi atas kekerasan atas nama agama.

Jika kita perhatikan terjadinya kekerasan atas nama agama, para ahli dalam hal sosiologi agama, politik maupun ilmu sosial lainnya memberikan penjelasan sekurang-kurangnya terdapat beberapa penyebab mengapa orang bersedia melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, sekalipun sebagian ahli agama melarangnya. Beberapa penyebab seperti yang akan saya kemukakan disini adalah penyebab yang sudah lazim dipahami oleh masyarakat dan para akademisi atau intelektual, tetapi tidak mengapa untuk mengulang penjelasan para ahli tersebut saya akan kemukakan dengan ringkas.

Persoalan pemahaman keagamaan, karena adanya keyakinan akan teks suci yang mengajarkan tentang terorisme dari kata jihad. Adalah bagian penting dari kekerasan agama yang dilakukan. Selain itu juga adanya pemahaman tentang ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum yang berjalan dalam sebuah negara, oleh sebuah rezim politik dan partai tertentu. Selain juga buruknya dalam hal hukum sehingga menimbulkan apa yang kita sebut sebagai ketidakadilan hukum, penegakan hukum yang tidak berjalan dengan maksimum, sehingga menumbuhkan kejengkelan dalam perkara hukum yang ada dalam sebuah negara. Inilah hal yang sangat penting dipikirkan agar kekerasan atas nama agama tidak terulang.

Persoalan pendidikan yang lebih menekankan pada aspek ajaran kekerasan dari agama, termasuk pendidikan yang lebih menekankan aspek indoktrinasi, tidak memberikan ruang diskusi tentang suatu masalah. Adalah masalah lain lagi yang sangat mungkin mendorong terjadinya radikalisisasi karena kebebalaan perspektif pendidikan agama. Oleh sebab itu harus dipikirkan kembali pendidikan agama yang bersifat transformative dan pembebasan pada umat manusia. Pendidikan agama tidak hanya mengajarkan persoalan jihad dalam makna kekerasan atau perang tetapi jihad dalam makna yang luas seperti memberantas kemiskinan, memberantas mafia hokum, memberantas money politik dan partai yang buruk adalah jihad yang sesungguhnya harus dilakukan.

Untuk sekedar memberikan fakta lapangan, perhatikan data Kekerasan atas Nama Agama demkikian banyak terjadi semasa tahun 2009-2013 tidak kurang dari 56 kasus, seperti dilaporkan oleh Setara Institute dan CRCS UGM dalam laporan tahunannya. Perhatikan data kekerasan antas nama agama yang terjadi di Indonesia, sebagai sebuah Negara yang tidak berdasarkan agama tetapi nilai-nilai agama tetap menjaid bagian dari praktek politik kenegaraan. Data dibawah ini akan memberikan kengerian tersendiri pada setiap umat beragama yang memiliki nurani dan kemanusiaan, sebab agama sangat melarang adanya tindak kekerasan termasuk membernagus dan merusak tempat-tempat ibadah apalagi membunuh nyawa manusia tanpa sebuah peristiwa peperangan yang alasannya jelas-jelas pengusiran atas nama agama. Perhatikan data dibawah ini betapa mengerikannya.

Kasus Kekerasan Agama, 2009-2013

No	Daerah /Provinsi	Jumlah Kasus
----	------------------	--------------

1	Sulawesi Tengah	48
2	Jawa barat	45
3	Jakarta	42
4	Jawa Timur	35
5	Maluku	34

Selain dari data diatas, kita juga dapat memperhatikan beberapa kasus kekerasan atas nama agama yang dapat kita katakana sebagai bentuk pelanggaran HAM dalam bidang agama di Indonesia seperti dilaporkan oleh CRCS UGM, Setara Institute, The Wahid Institute, maupun Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) sebagai berikut.

Survei The Wahid Institute Nopember 2012 menyebutkan terdapat 193 kasus pelanggaran atas kebebasan beragama yang dilakukan dengan bentuk kekerasan, pemaksaan dan pelarangan. Sementara itu, Setara Institute tahun 2012 menyebutkan terdapat 103 kasus pelanggaran kebebasan beragama dengan berbagai ancaman, perusakan, kekerasan bahkan penhilangan nyawa.

Hal yang juga menarik survey LSI dan Yayasan DENY JA menyebutkan tahun 2012, masyarakat kehilangan kepercayaan dan kepuasan terhadap lembaga Negara demikian rendah. Ketidakpuasan masyarakat atas Lembaga Kepresidenan mencapai 62,7%, ketidakpuasan terhadap Polisi 64,7% dan ketidakpuasan terhadap partai politik 58,1%. Rendahnya kepuasan masyarakat atas tiga lembaga Negara disebabkan kerja lambat, terkesan apatis, dan membiarkan dalam pelbagai kasus pelanggaran HAM kebebasan beragama di Indonesia.

Sementara itu berdasarkan pada laporan tahunan kebebasan beragama dan berkeyakinan, The Wahid Institute 2013 menyatakan bahwa selama Januari sampai Desember 2013, jumlah pelanggaran atau intoleransi keyakinan beragama berjumlah 245 peristiwa. Terdiri dari 106 peristiwa (43%) yang melibatkan aktor negara dan 139 peristiwa (57%) oleh aktor non-negara. Sementara total jumlah tindakan kekerasan dan intoleransi mencapai 280, dimana 121 tindakan (43%) dilakukan aktor negara dan 159 tindakan (57%) oleh aktor non negara. (The Wahid Institute Januari 2014).

Imparsial mencatat, terjadi 24 kasus penutupan gereja sepanjang 2005. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya, selama 2005 sebanyak 12 kasus. Bentuknya, mulai dari penyekatan, penangkapan, hingga pelarangan beribadah. Selanjutnya, Setara Institute (2007), mencatat bahwa di sepanjang 2007 telah terjadi 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara itu, laporan PGI dan KWI, sejak 2004—2007, terjadi 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja.

Pada tahun 2009, dalam laporan tentang kebebasan beragama yang dirilis The Wahid Institute (2009), mencatat bahwa sepanjang tahun 2009, terjadi 35 pelanggaran kebebasan beragama, 93 tindakan intoleransi. Aparat kepolisian adalah pelaku terbanyak tindakan pelanggaran, sedang ormas keagamaan pelaku terbanyak tindakan intoleransi. Laporan ini juga menyuguhkan banyaknya bermunculan peraturan yang dinilai diskriminatif. Setidaknya, ada enam perda bernuansa agama: Qanun Jinayah di Aceh, Perda Zakat di Bekasi, Perda Pelarangan Pelacuran di Jombang, Perda Pendidikan al-Quran di Kalimantan Selatan, Perda Pengelolaan Zakat di Batam, dan Perda Pengelolaan Zakat di Mamuju. Walikota Palembang, juga menekan surat bernomor 177 Tahun 2009, tentang Kewajiban Membayar Zakat bagi PNS di Kota Palembang.

Pada tahun 2010, The Wahid Institute kembali merilis laporannya. Hasilnya menyedihkan.

Kasus Pelanggaran naik; dari 35 kasus, menjadi 63 kasus pelanggaran. Sedang intoleransi; dari 93 kasus, menjadi 133 kasus, atau naik 30 persen. Salah satu faktornya, menurut analisis The Wahid Institute adalah adanya pembiaran yang dilakukan negara.

Hal senada, juga terlihat dalam laporan yang dirilis Setara Institute (2010). Sepanjang tahun 2010, terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan ber-agama/berkeyakinan, yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Dari 286, 103 tindakan, dilakukan oleh negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian; sebanyak dengan 56 tindakan. Selanjutnya Bupati/Walikota, Camat, Satpol PP, Pengadilan, Kementerian Agama, TNI, Menteri Agama, dan selebihnya, institusi-institusi lainnya.

Selain itu, riset yang juga dilakukan oleh Setara Institute, pada rentang 20 OKTOBER-10 November 2010, terhadap 1.200 responden, juga menunjukkan adanya trend peningkatan pemahaman anti toleransi. Survei yang mengambil responden warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabode- tabek) ini menyebut, (49,5 persen) responden tidak menyetujui adanya rumah ibadah bagi penganut agama yang berbeda dari agama yang dianutnya. Sedangkan (45 persen) lainnya, dapat menerima keberadaan rumah ibadah agama lain, dan sisanya tidak menjawab (Setara Institute; 2010, 11).

Pada tahun 2011, ICRP mencatat bahwa ternyata aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kelompok keagamaan tertentu, ternyata tak menurun. Aksi paling brutal menimpa jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, pada 6 Februari 2011. Tiga orang tewas dengan cara biadab. Kasus ini, tragisnya, menyulut desakan pembubaran dan keputusan kepala daerah untuk melarang aktivitas Ahmadiyah. Sejumlah kebijakan muncul di Jawa Timur, Pandeglang, Jawa Barat, Depok, dan sejumlah wilayah lain.

Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-JANUARI 2011, menyebut bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, dari 993 siswa yang disurvei, sekitar (48,9 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya, (51,1 persen) menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, (28,2 persen) menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama. (Tempo 2011).

Di samping itu, persoalan yang tak kalah penting adalah soal peran media dalam advokasi penguatan toleransi di media massa. Tantangan bias toleransi dalam meliput isu-isu keagamaan relatif masih menuai soal. Hasil riset The International Journal of Press dan Yayasan Pantau (2010), bertajuk “Misi Jurnalisme Indonesia: Demokrasi yang Seimbang, Pembangunan, dan Nilai- Nilai Islam”, menunjukkan problem ini. (vhrmedia.coM:2010).

Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI: 2012), menunjukkan bahwa trend intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan keberadaan orang lain (yang berbeda identitas (berbeda agama, maupun berbeda aliran dalam satu agama) di sekitarnya. Di tahun 2005, mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan yang berbeda agama (6,9%), pada tahun 2012, naik menjadi (15%). Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan orang berbeda aliran (Syiah) (26,7%) pada tahun 2005, menjadi (41,8%) pada tahun 2012. Publik yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda identitas tersebut, mayoritas adalah mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah (SMA

ke bawah), yakni sekitar (67,8%) keberatan untuk bertetangga dengan yang berbeda agama dan (61,2%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah. Sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi (SMA ke atas), (32,2%) tak nyaman bertetangga dengan yang berbeda agama, dan (38,8%) keberatan untuk bertetangga dengan orang Syiah.

Fakta-fakta di atas, setidaknya menunjukkan bahwa sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Keberagaman yang harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan konflik, anti-dialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya.

Berdasarkan atas fakta yang lapangan yang disampaikan The Wahid Institute diatas terdapat pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh setiap warga Negara yang mengaku memiliki keyakinan keagamaan. Hal apakah yang menyebabkan perilaku kekerasan dan tindakan melanggar undang-undang dasar terkait kebebasan beragama terus berlangsung? Bukankah kebebasan menganut keyakinan keagamaan merupakan hak asasi yang tidak dapat tergantikan di Indonesia?

Hal yang paling krusial jika kita mendasarkan pada fakta lapangan yang ditemukan The Wahid Institute perilaku pelanggaran dan tindakan kekerasan atas mereka yang beragama dilakukan oleh actor yang bernama Negara, bukan sekedar warga Negara. Padahal kita mengetahui bahwa Negara seharusnya berperan menjadi penjamin dan pengayom kebebasan berkeyakinan di dalam menganut suatu keyakinan keagamaan dan mengerjakan ibadah penganut agama sesuai keyakinannya.

Masalah Sektarianisme Intern dan Antaragama

Di Indonesia, merupakan Negara yang secara agama multi religious, baik internal (Islam terdapat berbagai mazhab), sedangkan secara eksternal kita mengenal enam “agama resmi” Negara, yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu. Sementara agama-agama non resmi seperti agama-agama suku dan keyakinan-keyakinan local seperti Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Cirebon, Parmalin di Sumatra, Wetu Telu di Lombok tidak diakui sebagai agama. Bersama-sama dengan Penganut Pengasih, Sapto Dharmo, dan lainnya di Jawa dikenal dengan sebutan penganut penghayat kepada Tuhan yang Maha Esa dan bagian dari kebudayaan. Padahal betapa banyaknya yang tidak masuk dalam anah “agama resmi” Negara jika berdasarkan UU PNPS tahun 1965 yang hanya mengakui enam agama resmi saja: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Konghucu, diluar enam tidak termasuk agama atau aliran yang sah di Indonesia. Di Indonesia sendiri seperti dalam PNPS (Peraturan Negara dan Pejabat Sipil) tahun 1965 mengatakan bahwa agama yang diakui di Indonesia hanya ada lima yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Islam.

Beberapa persoalan isu intern dan antaragama (sektarianisme) yang menjadi krusial untuk kita bicarakan dalam hubungannya dengan beberapa perilaku dan tindakan kekerasan antaragama di Indonesia sebagaimana dibawah ini merupakan hal sangat penting dalam menegakkan Hak asasi manusia sebagaimana pernah dilakukan oleh para penegak HAM di Indonesia, seperti dr. Yap Thian Hiem; Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Munawir Sajdzali, Baharuddin Lopa, Soetandjo Wignjo- soebroto, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif sebagai contohnya.

Mereka itulah beberapa tokoh yang tidak pernah berhenti menyuarakan agar di Indonesia pelanggaran-pelanggaran HAM terutama terkait dengan keke- rasan atas nama agama

(sektarianisme agama) dihentikan sebab agama dimanapun dan kapanpun sebenarnya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan kekerasan terhadap umat agama lain, hanya karena berbeda paham dan keyakinan. Banyak warga negara yang tidak bersedia menerima perbedaan agama karena keyakinan dan paham yang dianut sehingga menyebabkan kekerasan atas nama agama senantiasa terjadi di Indonesia, sehingga pernah menempatkan Indonesia menjadi “juara dunia” dalam hal kekerasan atas nama agama seperti dikemukakan Th. Sumartana karena sejak tahun 1965-1998 kekerasan atas nama agama mencapai lebih dari 340 kasus.¹⁶

Soal Dasar negara Pancasila adalah isu yang sampai sekarang dipersoalkan sebab dikatakan oleh sebagian kelompok agama di Indonesia utama Islam, bahwa Pancasila bukan dasar Negara yang cocok untuk Indonesia, sebab Pancasila hanya hasil kompromi politik umat Islam atas umat lain. Pancasila hendak diganti dengan dasar islam oleh sebagian kecil kelompok Islam Indonesia. Hal ini saya kira memang harus dicegah sebab sebagaimana kita ketahui Indonesia bukanlah Negara Islam atau Negara agama. Indonesia adalah Negara masyarakat beragama.

Persoalan Pendirian Rumah ibadah (gereja khususnya) merupakan kasus yang terjadi di berbagai tempat harus dipikirkan oleh kekuasaan dan umat ber- agama. Terdapat kesalahan politik berhubungan dengan rumah ibadah khususnya gereja. Ketika umat Kristen hendak mendirikan gereja sebagian umat Islam marah dan menolaknya malahan ada yang membakarnya. Hal ini salah satu penyebabnya umat Islam tidak mengetahui perlunya mendirikan gereja yang banyak oleh umat Kristen dan seandainya didirikan mungkin tidak perlu terlalu megah apalagi jika disitu umat Islamnya miskin alias kere. Hal ini akan membakar kecemburuan sosial antara orang Islam dan Kristen. Bahwa kaya dan miskin adalah hasil usaha tetapi juga kases politik serta ekonomi senantiasa mengiringi di belakangnya. Oleh sebab itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana antar umat saling hidup berdampingan tanpa kecemburuan dan kekerasan. Mendirikan gereja sebenarnya tidak masalah asalkan disetujui dan tidak menumbuhkan persoalan baru diantara mereka. Harus ada pemahaman yang dalam tentang gereja itu apa maknanya dan mengapa banyak harus dijelaskan pada umat Islam.

Inilah persoalan lain yang juga sering kali sangat serius. Kawin antaragama merupakan isu sangat penting yang muncul dalam sepuluh tahun terakhir bahkan selama dua puluh tahun terakhir. Sebab kawin antara agama identik dengan pindah agama. Padahal tidak selalu demikian. Sebab soal kawin agama tidak harus berpindah agama. Hanya saja dikalangan muslim kawin antar agama antara Islam dengan Kristen masih dianggap hal yang dilarang kitab suci karena dianggap kawin dengan kaum yang tidak sah sehingga dilarang. Namun sekarang sebagian intelektual muslim tidak lagi memadamkan kawin antar agama dalam perspektif teologis tetapi sosiologis dan psikologis selain cultural.

Inilah persoalan lain lagi yang hemat juga saya sangat serius yakni soal isu Pindah agama (konversi agama). Khususnya dalam tradisi Islam, soal pindah agama dianggap sebagai kafir dan murtad (tidak lagi beriman) sehingga akan banyak argument diajukan disana untuk menentang pindah agama dan menghentikan orang untuk pindah agama. Pemilihan agama dalam islam sekalipun dipersilahkan oleh kitab suci tetapi dalam prakteknya tidak demikian. Pindah agama dilarang keras tetapi kalau dari awal pada agama yang bukan Islam tidak dipersoalkan. Inilah yang menurut saya menjadi problem agama-agama misi yang kadang mencari pengikut dengan dakwah atau penyebaran di masyarakat yang beragam. Tidak mungkin umat Islam hanya berdakwah dikalangan umat Islam dan sebaliknya Kristen, mereka sama-sama agama misionaris maka menyebarkan kepada masyarakat adalah hal yang sebenarnya wajar.

Isu tentang Toleransi serta sektarianisme seringkali dikaitkan secara langsung dengan isu

pluralisme. Toleransi yang berlebihan jika ada istilah toleransi berlebihan (sebab saya sering mendengar istilah ini dikalangan sebagian umat Islam tentu saja) adalah istilah yang sangat krusial diantara umat islam sebab senantiasa dihubungkan dengan isu yang sekarang menjadi penting dalam sebuah masyarakat modern yang multi agama dan etnis. Pluralism inilah isu sangat sentral belakangan apalagi Majelis Ulama Indonesia memahami Plularisme adalah relativisme alias meniadakan keragaman dan keunikan agama-agama. Bahkan dalam pandangan MUI agama-agama itu dianggap sama oleh para pejuang pluralism padahal tidak demikian sama sekali. Pluralism bahkan sebuah gagasan dan praktek penghargaan yang hebat tentang keragaman agama yang ada di muka bumi. Pluralism sebenarnya menurut hemat saya adalah prinsip agamaku adalah agamaku dan agama mu adalah agama mu. Tidak ada campur aduk disana secara pasti sebab masing- masing agama memang memiliki keunikan dan perbedaannya.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari tulisan saya ini, sebagai penghormatan atas para penegak HAM di Indonesia dan para pembela kehidupan keagamaan, seperti Yap Thiam Hiem, Todung Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, Nurcholish Madjid, Munawir Sadzjali, Baharuddin Lopa, Soetandjo Wignjosoebroto, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif sebagai contohnya, sebagai tokoh yang membela ketertindasan, membela keterbukaan, membela nasionalisme Indonesia, dan membela politik yang beradab, saya akan kemukakan beberapa catatan akhir. Hemat saya sebagai sebuah negara yang multi etnis, multi kultur, multi agama, multi kelas sosial, maka akan gagal dalam membangun kebangsaan yang majemuk dalam negara kesatuan jika:

- (1) Jika muncul dan terus mengembangkan pandangan yang miopik egosentrism dan elitisme kelompok yang cenderung parokial dan chauvis dalam perilaku atas orang lain
- (2) Bergesernya keragaman menjadi polarisasi yang mengarah pada perpecahan antar kelompok dalam masyarakat
- (3) Munculnya sifat-sifat dan sikap otoriter dalam berpolitik (berorganisasi) yang cenderung melanggengkan politik keturunan, oligarkis, dan neo- feodalisme yang mengarah pada “politik dinasti”
- (4) Munculnya praktek-praktek politik yang kooptatif dan represif atas warga negara. Warga negara mendapatkan kooptasi dan tekanan-tekanan politik dari kekuasaan secara perlahan-lahan namun pasti dan terus menerus.
- (5) Menguatnya prasangka-prasangka primordial dan sektarian oleh warga negara, sehingga memunculkan kecenderungan menumbuhkan politik sektarian dengan meloloskan dan mengusung perda-perda yang sektarian, dan melakukan diskriminasi atas kelompok dan komunitas dalam masyarakat.

Di situlah hemat saya ada banyak pekerjaan rumah yang sangat berat pada bangsa ini sebagai bangsa yang given multi etnis, agama, suku dan warga Negara. Ketidakadilan masih berlangsung, diskriminasi politik, ekonomi, agama, minoritas terus berlangsung sehingga masih membutuhkan kerja keras membelanya. Jika kita tidak memiliki stamina yang panjang maka perjuangan menegakkan nilai-nilai luhur dan beradab sebagaimana dilakukan para pembela HAM dan aktivis antariman akan berhenti ditengah jalan. Namun kita tidak boleh pesimis sebab kita merupakan orang yang memiliki keyakinan akan perubahan. Kita harus meletakkan harapan perubahan di Indonesia untuk masa depan yang jauh lebih adil, baik dan beradab.

Perjuangan menuju keadaban demokrasi, perjuangan membela yang susah dan miskin, dan terbelakang adalah tugas semua orang yang jauh lebih sejahtera. Membela yang tertindas adalah kewajiban mereka yang merdeka. Membela yang kere adalah tugas dan kewajiban Negara selain

warga Negara yang sejahtera. Agama-agama harus didorong menuju pembelaan atas kaum miskin yang tersingkir, agama harus membela yang terbelakang, agama harus membela yang terdiskriminasi dari pelbagai macam tirani politik, ekonomi dan kultur. Agama harus menjadi agen yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan pada yang lemah bukan memberikan dukungan para elit politik yang curang dan diskriminatif. Agama harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan kelompok yang akan menumbuhkan kekerasan dan sektarianisme yang membelenggu masyarakat. Agama harus dihadirkan untuk membela rakyat yang melarat dan terdiskriminasi bukan membela para raja dan penguasa. Inilah agama yang hemat saya transformative dan akan bermanfaat untuk dunia.

Semua tindakan kebencian, teror dan perusakan harus mendapatkan perhatian serius dari aparat negara yang dinilai oleh publik lemah bahkan sebagai failed state, sehingga publik tidak mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan selama ini. Semoga Tahun 2014 ini dan lima tahun mendatang menjadi tahun yang lebih baik untuk kehidupan keagamaan di Indonesia. Kita tahu umat Islam adalah mayoritas mencapai 88,18 % dari total penduduk Indonesia 237.641.326 (BPS, 2010). Secara berurutan penganut Kristen : 16,5 juta/6,96%; 6,9 JUTA/2,4 % Katolik; 4 jt/1,69 % Hindu; 1,7 JT/0,72% Budha, 0,11 jt/0,05% Konghudu dan lainnya 0,13 %. Sekarang diperkirakan mencapai 240 juta, dengan etnis Jawa paling dominan 207 juta, tetapi tidak berarti umat lain tidak penting artinya di Indonesia, sebab makna keragaman (multi agama dan multi etnis) inilah yang membuat Indonesia itu kaya dan seharusnya hebat. (Periksa sensus penduduk BPS tahun 2010)

Kepada para peserta Seminar Agama-Agama (SAA) PGI, saya sampaikan selamat, semoga gagasan kita semua akan turut serta menyemaikan perdamaian dan keagamaan yang santun, sopan, hormat pada sesama penganut agama serta beragama secara dewasa dan cerdas. Bukan beragama dalam pikiran yang cetek dan pendek, sehingga gampang mengkafirkan mereka yang berbeda.

Bibliografi

- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009).
- Budi Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid* (Bandung: Mizan, 2006), Vol.4, 2967-9.
- Budiono Kusumohamidjojo (ed.), *Pendidikan Wawasan Kebangsaan*, (Jakarta: Grasindo, 1994).
- Hikmat Budiman, *Kewargaan Multikultural dan Dilema Kebangsaan* (Jakarta: Yayasan Interseksi-Tifa Jakarta, 2007).
- Hikmat Budiman, *Masyarakat Multikultur: Kebebasan dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Tifa Foundation dan Yayasan Interseksi, 2007)
- Jamal Al Bana, *Revolusi Sosial Islam: Dekonstruksi Jihad dalam Islam* (Jakarta: Pilar Media, 2005)
- JE Sahetapi, dkk, *Periksa Laporan Kekerasan Perusakan Rumah Ibadah di Indonesia* (Jakarta: FFKS, 1999).
- John Stroery, (ed), *Religion, Civil Society, and Globalization*, (Netherland: Universiteit van Amsterdam, 2012).
- Jose Casanova, *Public Religious in Amerika*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1994).
- Michael McCullough and Timothy Smith, "Religion and Health: Depressive Symtoms and Mortality as Case Studies, The Sociology of Religion," dalam Bryan S. Turner (ed.), *The*

Sociology of Religion (Oxford: Blackwell Company, 2003).

Peter Beyer, *Religion in Global Society* (New York: Routledge, 2006)

Richard Wood, "Religion and the Struggle for Justice," dalam Bryan S. Turner (ed.), *The Sociology of Religion* (Oxford: Blackwell Company, 2003).

Roger Finke and Rodney Stark, "The Dynamics of Religious Economies," dalam Bryan S. Turner (ed.), *The Sociology of Religion* (Oxford: Blackwell Company, 2003).

Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel* (New York: Paradigm Publisher, 2011). Wahid Foundation, "Laporan Tahunan dan FGD Intoleransi Keagamaan di Indonesia," *report*, 2/8/2016.

Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan* (Bandung: Mizan, 2014) Yudi Latif,

Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia, 2012).

Zuly Qodir (ed), *Muhammadiyah dan Civil Society*, (Yogyakarta: Pasca- sarjana UMY, 2015)

Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014)